

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Kerangka Pemikiran	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS	40
A. Pemalsuan Surat dalam KUHP	40
1. Pengertian Pemalsuan Surat	40
2. Pemalsuan Surat dalam KUHP	41
3. Klasifikasi Pemalsuan Surat	42
4. Pemalsuan Surat terkait Dokumen Pertanahan	42
5. Akibat Hukum Pemalsuan Surat	43
B. Tanah Eigendom Verponding	46
1. Pengertian Eigendom Verponding	47
2. Kedudukan Eigendom Verponding setelah berlakunya UUPA 1960	47
C. Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanah	50
1. Pengertian Modus Operandi	50
2. Jenis dan Bentuk Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanah	50
3. Modus Operandi dalam Kasus Eigendom Verponding	51
D. Tindak Pidana	53

1. Pengertian Tindak Pidana	56
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	65
3. Klasifikasi Tindak Pidana	71
4. Asas-Asas Hukum Pidana	72
5. Teori-Teori Tentang Pemidanaan	75
6. Teori Tindak Pidana sebagai Grand Theory	80
E. Pertanggungjawaban Pidana	81
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	81
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	82
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat	85
4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Pertanahan	86
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai Middle Range Theory	88
F. Pembuktian	89
1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian	90
2. Perbedaan Pembuktian dalam Hukum Pidana dan Perdata.....	91
3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana	94
4. Sistem Pembuktian dalam Hukum Perdata	95
5. Alat Bukti dalam Hukum Pidana	97
6. Alat Bukti Dalam Hukum Perdata	99
7. Teori Pembuktian sebagai Applied Theory	102
G. Pembuktian dalam Hukum Pidana Terkait Pemalsuan Surat	103
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	109
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	109
B. Jenis dan Sumber Data	111
C. Teknik Pengumpulan Data	112
D. Teknik Analisis Data	113
E. Agenda dan Lokasi Penelitian	113
BAB IV PEMBAHASAN	115

A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg	115
B. Dasar/Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg	124
C. Implikasi dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 601/Pid.B/2024/PN.Bdg Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah	130
D. Modus Operandi Pemalsuan Surat Tanah Eigendom Verponding Berdasarkan Penyidikan Polda Jawa Barat dan Putusan PN Bandung No.601/Pid.B/2024/PN.Bdg	140
BAB V PENUTUP	156
A. Simpulan	156
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	165